

**JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT
AMBANG BATAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH SYARI'YAH***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**Wahyu Febrian
NIM. 1911150110**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2023 M/ 1444 H**





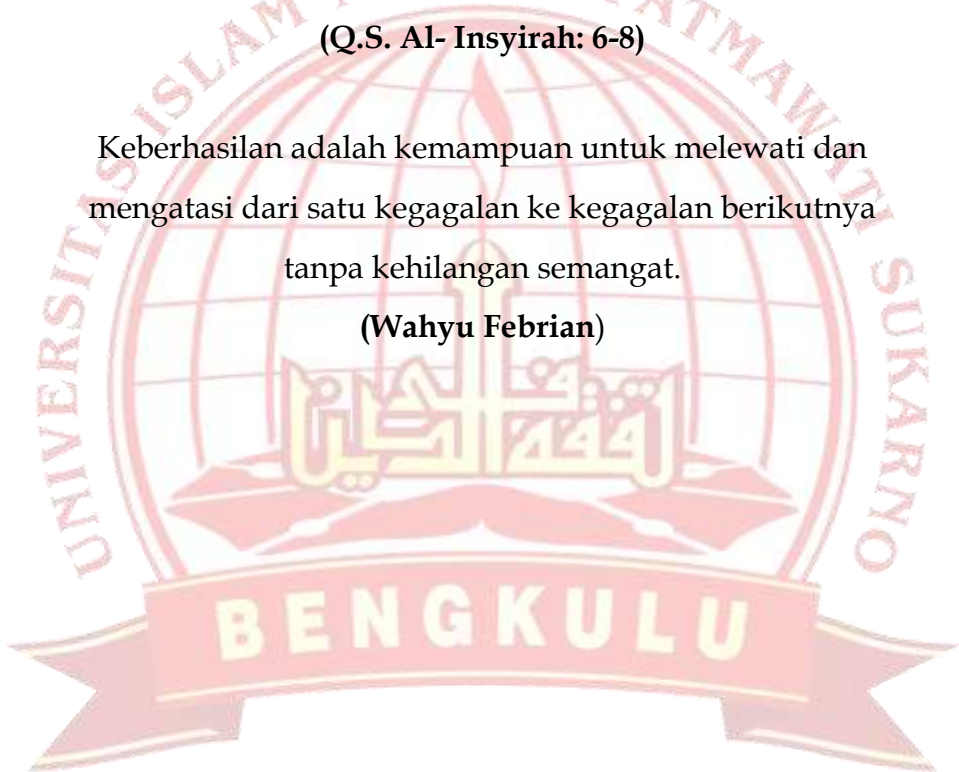
MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Wahyu Febrian)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Swt tuhan seru sekalian alam yang memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari Rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan do agar dibalas Allah Swt terutama kepada :

1. Kepada Allah SWT
2. Kepada orang tuaku : Ibu (Nina) dan Bapak (Nawawi), yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada saya jatuh dan dalam keadaa terpuruk. Dan selalu memanjatkan do'a sehingga selama saya menempuh Pendidikan ini selalu diberikan kelancaran oleh Allah Swt. Terimakasih kepada orangtuaku.
3. Kepada adikku : (Wepen Apriza), yang selalu memberikan kebahagiaan dan selalu menghibur saya pada saat saya dalam keadaan terpuruk.
4. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam menempuh Pendidikan ini.
5. Kepada dosen pembimbing skripsi : Bapak Dr. H. Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum sebagai pembimning I dan bapak Edy Mulyono, M.E., Sy sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan
6. Untuk dosen-dosen dilingkungan UINFAS Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman

7. Untuk orang special Clara Lavenia terimakasih telah memberikan motivasi nasehat dan dukungan selama saya menempuh Pendidikan ini.
8. Dan teman-teman Hukum Tata Negara kelas C Angkatan 2019
9. Squat Srigala Trakhir
10. Almamater tercinta UiNFAS Bengkulu.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul *“Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif Siyasa Syari’iyah”* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas Syari’ah ats nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2023
Mahasiswa yang menyatakan,

Wahyu Febrin
NIM. 1911150110

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi ALLAH SWT. Karna dengan nikmat hidup dan nikmat kesehatannya-lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul ***“Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif Siyasaah Syari’iyah”***.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada beliau nantinya kita pendapat syafaatnya di yaumul akhir dan serta berkat ajarannya kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat islam sepertisaat sekarang ini ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa mengarahi dan memberi masukan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada :

1. Drs. H. Zulkarnain D, M.Pd Rektor UIN Fatmawati Suekarno Bengkulu.
2. Dr. H. Suwarjin, S.Ag., MA Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Suekarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos ketua prodi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Fatmawati Suekarno Bengkulu.
4. Dr. H. Jhon Kenedi, S.H., M.Hum pembimbing I dan Edy Mulyono, M.E., Sy pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mengutamakan pendidikan anaknya.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Suekarno Bengkulu, yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan ilmunya.
7. Staf dan karyawan prodi Hukum Tata Negara, staf dan karyawan fakultas syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya namun demikian penulis berupaya agar dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis memohon masukan saran dan kritik yang membangun dari pembaca terutama dosen penguji skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat yang nantinya sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Bengkulu, Mei 2023

Wahyu Febrian

NIM. 1911150110

ABSTRAK

JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT AMBANG BATAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYARI'YAH*

Oleh

Wahyu Febrian

NIM 1911150110

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2) Bagaimana tinjauan *Siyasah Syari'iyah* terhadap *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil kajian bahwa 1. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri dengan kokoh meskipun sudah 14 (empat belas) kali dilakukan *judicial review*. Aspek HAM, yaitu hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan maju dalam pemilu menjadi sangat terbatas. Juga, tidak memberikan kesempatan bagi partai baru sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dipersyaratkan harus memiliki kursi pada pemilu periode sebelumnya. Di samping itu, *presidential threshold* mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. *Presidential threshold* sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara yang memiliki sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial, karena dalam sistem pemerintahan presidensial persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural, bukan sebagai sarana transaksional yang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kajian *siyasah syari'iyah* seseorang yang dapat diajukan sebagai imamah atau pemimpin sejatinya harus berasal dari keturunan suku Quraisy dan tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak harus dari keturunan suku Quraisy untuk menghilangkan rasa ashabiyah. Sedangkan, dalam sistem *presidential threshold* atau syarat ambang batas pencalonan adalah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 Undang-undang UU Pemilu, yang mutlak syarat ini.

Kata kunci: Judicial Review, Presidential Threshold, dan Siyasah Syari'iyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Negara Hukum.....	19
B. Teori Demokrasi.....	41
C. Teori Perwakilan	48
D. Teori Siyasa Syari'iyah	59
BAB III PEMBAHASAN	

A. <i>Judicial Review</i> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas <i>Presidential threshold</i> Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	74
B. Tinjauan Siyasah Syari'iyah terhadap <i>Judicial Review</i> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas <i>Presidential threshold</i> di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

